

Pendahuluan

Seiring dengan kemerdekaan Indonesia, seluruh rakyat mempunyai hak atas persamaan atau hak yang sama dalam segala aspek kehidupan, termasuk aspek pendidikan, tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, suku, agama, atau ras. Pada dasarnya istilah pendidikan adalah upaya mengajar, membimbing, dan menciptakan situasi dan kondisi belajar untuk mengoptimalkan keterampilan yang ada pada peserta didik (Arianti, 2019).

Selain proses spiritual, keagamaan, dan pembentukan karakter. Pendidikan juga merupakan proses pengembangan pribadi dalam ranah emosional, kognitif, dan psikomotorik (Arifin, 2017). Artinya, pendidikan juga mempunyai peranan penting dalam pembentukan generasi penerus bangsa Indonesia. Pendidikan itu berfungsi untuk memajukan bangsa dan masyarakat. Keberadaan komunitas atau kelompok masyarakat diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dan bekerja sama dengan baik bersama sekolah sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat berjalan lancar.

Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak seluruh warga negara atas pendidikan, dan pemerintah juga berkewajiban menyelenggarakan sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Meski begitu, ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan akses pendidikan kepada seluruh masyarakat masih menjadi kelemahan pemerintah itu sendiri (Sirait, 2017; Yonantias, 2019; Zulkarnaen & Dwi Handoyo, 2019).

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki panjang garis pantai sekitar 81.900 kilometer dan berbatasan dengan berbagai negara. Garis ini memisahkan daratan dan lautan. Indonesia berbatasan langsung dengan

Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Perbatasan darat Indonesia dan Malaysia terlihat dari utara yaitu di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur (Aos Y. Firdaus & Harun Umar, 2022).

Kawasan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia selalu menjadi perhatian utama. Permasalahannya adalah wilayah perbatasan yang jauh dari pusat pemerintahan dan berada di tempat terpencil yang sulit dijangkau, serta aksesibilitas transportasi yang kurang memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat (Rachmawati & Dewi, 2021). Di daerah perbatasan juga banyak terdapat masyarakat yang memiliki kewarganegaraan ganda (Affandi & Darmawan, 2021). Ini merupakan rahasia umum bagi masyarakat perbatasan. Mereka merahasiakan kedua kartu kewarganegaraan dan status kepemilikannya dari aparat keamanan kedua negara. Dengan status warga negara Malaysia, mereka mempunyai keistimewaan yaitu bisa mendapatkan produk-produk Malaysia dengan harga murah dan juga bisa berdagang antar negara dengan mudah. Kegiatan serupa terjadi di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Di Indonesia, kelompok masyarakat yang dibentuk untuk tujuan tertentu berdasarkan kesepakatan bersama disebut dengan organisasi kemasyarakatan (Herdiansah, 2016). Atas dasar persamaan atau tujuan tertentu maka dapat didirikan organisasi, misalnya organisasi sosial, keagamaan, atau pendidikan.

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam tertua di Indonesia tidak pernah lelah berupaya semaksimal mungkin untuk kemaslahatan umat. Organisasi ini telah berperan besar dalam menangani berbagai permasalahan dalam sistem pendidikan bangsa. Misalnya, mendirikan sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA dan

seperti deskriptif persepsi, tindakan, motivasi, atau perilaku lain yang dijelaskan dalam bahasa deskriptif, merupakan tujuan penelitian kualitatif (Pahleviannur et al., 2022). Penelitian ini berfokus pada kerjasama pemerintah dengan organisasi masyarakat Muhammadiyah dalam pemenuhan hak dasar pendidikan di Kepong, Malaysia.

Lokasi penelitian berada di Wilayah Kepong, Malaysia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang disajikan kembali. Tinjauan data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan

informan yaitu Pak Aqil selaku pengelola Balai Bimbingan Kepong, guru-guru disana, dan siswa di Sanggar Bimbingan Muhammadiyah Kepong.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan peneliti melalui wawancara mendalam untuk menerima informasi secara lisan melalui pembekalan langsung kepada sejumlah narasumber yang dapat memberikan informasi mengenai pertanyaan penelitian. Selanjutnya peneliti juga melakukan studi literatur tanpa membaca literatur atau sumber tertulis seperti buku, penelitian terdahulu, makalah, jurnal, atau artikel yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian sebelumnya dengan judul “Upaya Indonesia dalam Menangani Pendidikan Anak Pekerja Indonesia di Sabah, Malaysia” (Christie, 2016), Penelitian ini mengkaji tentang upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani pendidikan anak pekerja migran Indonesia. Upaya Indonesia terbagi menjadi dua upaya pemenuhan pendidikan anak pekerja migran Indonesia di Sabah. Adanya keterkaitan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia ini dikarenakan pemerintah Indonesia sendiri dirasa belum siap atau bahkan tidak mampu memberikan solusi jika negara tempat pekerja migran Indonesia mencari sumber penghasilan tidak memberikan izin dan ikut serta dalam kegiatan tersebut. Upaya penanganan dalam pelayanan pendidikan. Namun tidak hanya menjalin kerja sama dengan Malaysia, pemerintah juga mempunyai inisiatif lain seperti mendirikan sekolah di luar negeri, mengadakan kelompok belajar, dan mengirimkan tenaga pendidik asal Indonesia untuk mengajar anak-anak di Sabah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan

Kualitatif mempunyai persamaan dengan peneliti yaitu membahas tentang pendidikan anak pekerja migran Indonesia, namun mempunyai lokasi penelitian yang berbeda yaitu di Sabah. Sedangkan peneliti mengambil lokasi di Kepong.

Penelitian lain yang berjudul “Peran Aktif LSM Humana dalam Fasilitasi Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia (TKI) di Sabah, Malaysia” (Muyamin, 2019), Penelitian ini membahas tentang latar belakang Humana sebagai lembaga swadaya masyarakat di Sabah, Malaysia, yang memberikan akses pendidikan kepada anak Indonesia yang tidak memiliki dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Humana mempunyai ide dasar yang mendorong tujuan atau sasaran dan bertujuan untuk berperan aktif dalam memberikan fasilitas pendidikan kepada anak-anak pekerja migran Indonesia di Sabah. Adanya suatu lembaga atau organisasi yang menjadi subjek penelitian merupakan persamaan antara penelitian ini dengan peneliti. Lokasi penelitian adalah Sabah, Malaysia, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya. Sedangkan peneliti berada di Kepong, Malaysia.

Dalam penerapan kurikulum yang terdapat pada sistem pendidikan Malaysia sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Di Malaysia, kurikulumnya berlanjut mulai dari prasekolah hingga sekolah dasar dan menengah serta menerapkan konsep pendidikan seumur hidup. Sedangkan di Indonesia, kurikulum dilaksanakan secara berkelanjutan mulai dari pendidikan prasekolah hingga pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Aspek yang dinilai juga melibatkan pengetahuan, nilai, dan keterampilan (kognitif, afektif, dan psikomotorik) (Nurlitasari et al., 2023).

Di Sanggar Bimbingan Kepong sendiri, sistem pengajarannya mengacu pada Sekolah Indonesia Kuala Lumpur dengan menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Mata pelajaran yang diajarkan adalah: IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Agama Islam.

Penelitian selanjutnya yang berjudul “Peran KJRI Kota Kinabalu dalam Peningkatan Akses Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia di Sabah” (Andita et al., 2016) dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini mendeskripsikan adanya permasalahan internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja KJRI Kinabalu dalam memfasilitasi akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran di Sabah. Kemiripannya dengan peneliti yang membahas tentang pendidikan anak Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah subjek penelitian disini adalah KJRI Kota Kinabalu. Sedangkan peneliti menggunakan subjek organisasi kemasyarakatan.

Penelitian lainnya berjudul “Masalah Pendidikan di Perbatasan: Studi Kasus Pendidikan Dasar Anak Pekerja

Migran Indonesia di Negara Bagian Sarawak, Malaysia” (Sulistya Handoyo & Triarda, 2020). Mereka membahas bagaimana kerja sama dengan kemitraan dan sektor swasta dapat menutupi ketidakmampuan negara dalam menyediakan akses atau layanan pendidikan. Kolaborasi ini bisa dikatakan sukses. Namun kerjasama ini tidak bersifat permanen. Oleh karena itu, perlu dipikirkan kembali solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ide dan kebijakan baru harus segera ditemukan untuk mengatur pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia di wilayah Malaysia, khususnya di Sarawak. Memiliki kesamaan dengan peneliti yaitu membahas tentang pendidikan anak pekerja migran. Namun terdapat perbedaan di lokasi penelitian yaitu Sarawak, Malaysia.

Selanjutnya penelitian tersebut diberi judul “Tanggung Jawab Negara Atas Hak Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia di Malaysia” (Viviansari, 2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan anak pekerja migran Indonesia di Malaysia memang kompleks. Maka tanggung jawab kita semua adalah membantu mewujudkan hak pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Dengan kerja sama kedua negara, Indonesia dan Malaysia, harus segera dicarikan solusinya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pendidikan yang berlandaskan hukum konseptual dan hak asasi manusia. Memiliki persamaan dengan peneliti yaitu permasalahan yang diteliti mengenai hak pendidikan anak pekerja migran Indonesia. Namun penelitian ini tetap membahas tentang tanggung jawab negara terhadap hak pendidikan anak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Sementara itu, peneliti membahas peran organisasi masyarakat dalam

pemenuhan hak dasar pendidikan anak-anak yang tidak memiliki dokumen.

Peran Pemerintah Indonesia dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan

Salah satu penyumbang devisa negara adalah kepergian para pekerja migran Indonesia ke luar negeri untuk bekerja (Pasetia, 2012). Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mencatat pada tahun 2022, Malaysia akan menjadi negara tujuan terpopuler ketiga dengan jumlah pekerja migran Indonesia sebanyak 43.163 orang.

Angka-angka di atas belum termasuk pekerja migran Indonesia tidak berdokumen yang secara ilegal disebut sebagai “migran asing tanpa izin” (PATI). Dampak negatif dari banyaknya jumlah pekerja migran adalah meningkatnya jumlah anak pekerja migran Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa pekerja migran Indonesia memilih Malaysia sebagai negara tujuan, antara lain karena mendapatkan upah yang lebih layak dibandingkan bekerja di Indonesia. Selain itu, kedekatan budaya dan letak geografisnya tidak terlalu jauh dari wilayah Indonesia.

Hal ini kemudian menimbulkan permasalahan baru terkait hak pendidikan anak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Permasalahan ini muncul karena meningkatnya jumlah pekerja migran yang tidak berdokumen atau ilegal. Ketiadaan dokumen yang lengkap menjadi salah satu penyebab anak-anak pekerja migran Indonesia tidak mendapat kesempatan bersekolah secara formal.

Dalam hal ini, kurangnya kesadaran para orang tua akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anaknya juga menjadi permasalahan. Masih banyak orang tua yang menginginkan anaknya tidak mengenyam pendidikan dan

menyekolhkannya bekerja. Tanpa dukungan orang tua, pemenuhan hak atas pendidikan juga akan mengalami kesulitan. Banyak orang tua yang masih beranggapan bahwa menyekolahkan anaknya bukanlah suatu hal yang wajib.

Sebenarnya tidak banyak perbedaan antara persyaratan yang dibutuhkan dengan peraturan di Indonesia, yaitu kelengkapan dokumen dari siswa dan segala sesuatu yang diperlukan seperti akta kelahiran dan kartu keluarga. Permasalahan utama adalah anak-anak pekerja migran Indonesia di Kepong yang tidak mempunyai akses terhadap layanan formal karena sebagian besar dari mereka tidak memiliki dokumen seperti akta kelahiran. Akta kelahiran menjadi permasalahan yang menghalangi anak-anak pekerja migran Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tidak dapat dibuatnya akta kelahiran karena sebagian besar dari mereka lahir dari orang tua yang menikah secara tidak sah tanpa menggunakan dokumen apapun, sehingga perkawinannya tidak diakui oleh negara. Akta kelahiran seharusnya menjadi salah satu syarat terpenting bagi seorang anak untuk dapat bersekolah secara formal.

Pemerintah Malaysia telah menetapkan peraturan bahwa pekerja migran tidak boleh membawa keluarga atau menikah selama masa kontrak kerjanya dan wajib memiliki dokumen resmi. Namun banyak pekerja Indonesia yang justru melanggar peraturan tersebut sehingga menimbulkan permasalahan baru pada layanan pendidikan yang diberikan kepada anak pekerja migran Indonesia yang lahir di Malaysia.

Adanya pekerja migran Indonesia ilegal menyebabkan status anaknya menjadi anak tanpa dokumen kewarganegaraan. Departemen Pendaftaran Nasional Malaysia pada akhirnya tidak dapat menerbitkan akta

kelahiran bagi mereka. Banyak masyarakat Indonesia yang sudah menikah atau berkeluarga di Indonesia kemudian membawa keluarganya ke sini baik secara legal maupun ilegal.

Ada yang sudah hidup permanen, bahkan ada yang sudah mencapai dua hingga tiga generasi. Tak hanya itu, mereka juga tidak memiliki dokumen identitas seperti kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Sebagian besar anak pekerja migran Indonesia lahir di Malaysia akibat perkawinan ilegal antara pekerja migran Indonesia ilegal, atau anak-anak tersebut datang ke Malaysia bersama orang tuanya melalui perbatasan secara ilegal. Ada pula anak yang berasal dari perkawinan tidak sah antara pekerja migran Indonesia dengan warga negara Malaysia atau pekerja migran. India dengan warga negara lain seperti Myanmar, Bangladesh, atau India. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Aqil (manajer Sanggar Bimbingan Kepong);

“Hampir seluruh siswa Sanggar Bimbingan Muhammadiyah Kepong tidak memiliki surat-surat karena perkawinan orang tuanya tidak resmi, dan sebagian besar juga hanya melangsungkan perkawinan secara agama tanpa adanya pencatatan sipil bahwa mereka telah menikah.”

Minimnya sekolah di Kepong yang dapat memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia juga menjadi permasalahan. Jumlah sekolah yang tersedia tidak cukup untuk menjangkau seluruh anak pekerja migran. Sekolah yang dibangun jauh dan sulit dijangkau. Anak-anak pekerja migran terkendala biaya transportasi untuk berangkat ke sekolah setiap hari.

Eksistensi Ormas Muhammadiyah dengan Mendirikan Sanggar Bimbingan

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yaitu Pusat Bimbingan (SB) resmi didirikan oleh Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Malaysia. Kepong Guidance Studio merupakan pusat pendidikan nonformal yang berlokasi di Kepong, Kuala Lumpur. Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atikbud) KBRI Malaysia meresmikan pusat bimbingan ini pada 19 Maret 2022.

Pada awal peresmiannya, Sanggar Bimbingan Kepong memiliki 27 siswa usia SD yang semuanya merupakan anak-anak pekerja migran Indonesia di kawasan Kepong (Affandi, 2022). Alamat Pusat Bimbingan Muhammadiyah Kepong berada di Pelangi Magna Blok A/13, Jalan Prima 3, Metro Prima, 52100 Kuala Lumpur Federal Territory. Saat ini Sanggar Bimbingan Muhammadiyah Kepong mempunyai jumlah siswa sebanyak 58 orang, terdiri dari 5 kelas yaitu kelas PAUD, kelas 1, kelas A, kelas B, dan kelas C.

Relawan dari Muhammadiyah dan Aisyiyah di Malaysia, termasuk mahasiswa, ibu rumah tangga, dan warga sekitar, juga membantu mendirikan studio tersebut. Sanggar Bimbingan Pembelajaran akan disesuaikan dengan program pendidikan nonformal oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan WNI yang tidak memiliki dokumen mempunyai kesempatan untuk belajar dan bersekolah. Melalui pusat bimbingan ini, anak-anak pekerja migran dapat mengikuti kurikulum nasional dan mendapatkan Nomor Pokok Siswa Nasional dengan mengikuti UN hingga mendapatkan ijazah sekolah seperti sekolah pada umumnya.

Keberadaan pusat bimbingan di Kepong terdiri dari empat orang guru yang juga berperan sebagai staf akademik dan pimpinan sanggar. Mereka adalah pelajar dan ibu rumah tangga yang berasal dari

Indonesia namun menetap di Malaysia. Keterbatasan inilah yang menjadi tantangan bagi pengembangan sanggar bimbingan di Kepong.

Dengan berdirinya sanggar ini menjadi bukti komitmen Muhammadiyah dalam membantu dan membina pendidikan anak bangsa. Kepong Guidance Center merupakan studio kedua yang didirikan oleh PCIM Malaysia. Pusat bimbingan pertama didirikan di kawasan Kampung Baru yang terletak di pusat kota Kuala Lumpur. Balai Bimbingan yang didirikan oleh Muhammadiyah ini terutama diperuntukkan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen lengkap.

Anak-anak dan orang tua menyambut dengan senang dan antusias keberadaan pusat bimbingan ini. Sebelum adanya pusat bimbingan di kawasan Kepong, banyak anak-anak pekerja migran Indonesia yang belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Bahkan pada awal berdirinya sanggar ini, hampir semuanya belum mengenal huruf maupun angka, padahal usianya sudah 8–12 tahun. Aktivitas mereka selama belum ada pusat bimbingan hanya membantu orang tua bekerja atau bermain game di ponsel. Selain itu, alasan mereka senang dengan adanya pusat bimbingan adalah karena di rumah banyak dari mereka yang sering mengalami kekerasan dari orang tuanya.

Hal ini juga senada dengan yang disampaikan oleh siswa kelas C bernama Rouf sebagai berikut: “Kami sangat senang sekali ketika ada sekolah di sini, kami belum pernah belajar di sekolah tersebut sebelumnya. Kami baru mulai belajar membaca dan berhitung, belajar mengenal huruf dan angka.”

Tak hanya memberikan pendidikan kepada anak pekerja migran Indonesia yang tidak memiliki dokumen. Namun

pusat bimbingan yang berada di bawah naungan Muhammadiyah ini juga mengeluarkan sertifikat sebagai output atau capaian pembelajaran bagi anak-anak selama belajar di pusat bimbingan Muhammadiyah di Kepong. Ijazah merupakan bagian penting dari proses pendidikan yang dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran di suatu pusat pendidikan.

Masih belum banyak sanggar bimbingan yang bisa menerbitkan sertifikat secara resmi. Kebanyakan pusat bimbingan hanya fokus pada pendidikan anak di masa kini dan belum memikirkan masa depan. Untuk mendapatkan ijazah, anak-anak tersebut akan mengikuti Ujian Paket A setara sekolah dasar di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL). Sanggar Bimbingan Kepong merupakan satu-satunya sekolah di wilayah Kepong yang dapat menerbitkan sertifikat kepada siswanya. Ijazahnya sendiri dikeluarkan langsung oleh KBRI melalui SIKL. Selama ini penerbitan akta bagi anak yang belum memiliki dokumen dinilai sangat sulit. Faktanya, banyak sekolah dan pusat pembelajaran lain yang memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak, namun biasanya hanya kegiatan belajar yang ditawarkan dari kelas 1 sampai kelas 5, dan tidak ada ujian. Ijazah yang dikeluarkan diharapkan dapat membantu kehidupan mereka di masa depan.

Keberadaan Sanggar Bimbingan Kepong juga membantu dalam membangun karakter anak dengan pendidikan dasar seperti akhlak, ilmu pengetahuan, membaca, menulis, dan berhitung. Seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya, masih rendahnya pemahaman terhadap pola asuh orang tua dan kurangnya kesadaran akan pendidikan pada anaknya.

Anak-anak di Sanggar Bimbingan Muhammadiyah Kepong tidak hanya diberikan pengetahuan umum saja.

Namun mereka juga dibekali ilmu agama. Dalam kegiatan belajar mengajar disekolah atau sanggar bimbingan, sebelum masuk kelas, anak dibiasakan melaksanakan shalat dhuha berjamaah yang dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Alquran. Kegiatan ini berlangsung selama 30 menit.

Selain itu, pusat bimbingan ini juga menyelenggarakan kegiatan pendidikan Al-Qur'an. Kegiatan ini berlangsung pada hari Senin sampai Jumat dan dimulai setelah salat magrib hingga azan magrib. Kegiatan yang dilakukan adalah salat magrib berjamaah kemudian dilanjutkan dengan belajar membaca Al-Quran. Tak hanya itu, para guru juga mengajarkan kepada anak-anak tentang ilmu Islam tentang tata cara shalat dan tata cara wudhu yang benar menurut syariat Islam. Selain itu, mereka juga diberikan ilmu tentang rukun iman, rukun Islam, serta nama-nama nabi dan malaikat. Kegiatan ini dilaksanakan setelah seluruh siswa belajar membaca Al-Quran bersama guru.

Kondisi ini sebenarnya merupakan tugas negara yang belum terlaksana; Oleh karena itu, konsep yang patut diusung adalah tata kelola pemerintahan yang demokratis guna mengatasi permasalahan anak pekerja migran Indonesia di Malaysia yang tidak memiliki dokumen. Kolaborasi antar aktor yang terjadi antara pemerintah, Muhammadiyah, dan himpunan mahasiswa Indonesia di luar negeri sangat membantu dalam menangani permasalahan sosial yang dialami WNI di Malaysia.

Kesimpulan

Hasil di atas menunjukkan bahwa anak-anak pekerja migran Indonesia kesulitan mengakses pendidikan karena orang tuanya masuk ke Malaysia atau bekerja di sana tanpa mengikuti

persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Melihat permasalahan tersebut, Muhammadiyah menjalankan peran atau kontribusinya dalam menangani permasalahan pendidikan di Kepong. Peran Muhammadiyah adalah dengan didirikannya Pusat Bimbingan Muhammadiyah Kepong yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Peneliti berharap permasalahan sosial pekerja migran Indonesia ilegal di Malaysia dapat diselesaikan secepatnya dan tidak mengganggu pemenuhan hak dasar pendidikan sehingga anak-anak pekerja migran Indonesia di Kepong, Malaysia, dapat bersekolah seperti anak-anak di Indonesia. Dan pemerintah dapat mencari solusi terbaik terhadap permasalahan pendidikan anak.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Asosiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (ALPTK-PTM) dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan RI di Kuala Lumpur yang telah memfasilitasi dan bekerjasama dalam Program Pengabdian Masyarakat Internasional Bidang Pendidikan angkatan keempat.

Daftar Pustaka

Affandi. (2022). *Penuhi Kebutuhan Pendidikan Anak Pekerja Migran, PCIM Malaysia Kembali Dirikan Sanggar Belajar*. Muhammadiyah.or.Id.

Affandi, I., & Darmawan, C. (2021). Citizenship Education Challenges in Border Areas: A Case Study in Sebatik Island, Nunukan Regency, North Kalimantan Province. *1st International Conference Of Education, Social And Humanities (INCESH 2021)*, 581(Incesh), 472-476.

- Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 15(1), 381–390.
<https://doi.org/10.37680/QALAMU.NA.V15I1.2413>
- Pahleviannur, M. R., Grave, A. D., Saputra, D. N., Mardianto, D., & Mahardhani, A. J. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Pasetia, I. (2012). Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia Melalui Kota Semarang. *Internasional, Astra*, 4(2), 1–27.
- Rachmawati, I., & Dewi, M. A. (2021). Nationalism in Border Community: Temajuk, Sambas District, West Kalimantan Indonesia. *Journal of Nationalism Memory and Language Politics*, 15(2), 210–229.
<https://doi.org/10.2478/jnmlp-2021-0002>
- Sholina, C. A. (2022). PEMENUHAN HAK-HAK ASASI ANAK TENAGA KERJA INDONESIA DI PERKEBUNAN SAWIT DI WILAYAH TAWAU, SABAH, MALAYSIA. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 3(1), 12.
<https://doi.org/10.7454/jpm.v3i1.1029>
- Sirait, S. C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 158–182.
<https://doi.org/10.30596/DLL.V2I1.1146>
- Sulistya Handoyo, B., & Triarda, R. (2020). Problematika Pendidikan di Perbatasan: Studi Kasus Pendidikan Dasar bagi Anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Bahagian Sarawak, Malaysia. *Transformasi Global*, 7(2), 201–213.
<https://doi.org/10.21776/ub.jtg.200007.02.2>
- Sulton, S., Mahardhani, A. J., & Sunarto, S. (2021). STRENGTHENING CITIZEN POLITICAL EDUCATION TO MUHAMMADIYAH YOUTH. *DidaktikaReligia*, 9(2), 399–418.
<https://doi.org/10.30762/DIDAKTIK.A.V9I2.3483>
- Viviansari, D. B. (2019). Tanggung Jawab Negara terhadap Pemenuhan Hak atas Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia di Malaysia. *Jurnal HAM*, 10(2), 179.
<https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.179-194>
- Yonantias, N. (2019). Mewujudkan Pendidikan yang Adil dan Merata di Indonesia DDIP.
<https://doi.org/10.31227/OSF.IO/BGCZJ>
- Zulkarnaen, Z., & Dwi Handoyo, A. (2019). Faktor-faktor Penyebab Pendidikan Tidak Merata di Indonesia . *Menjadi Mahasiswa Yang Unggul Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0*.